



# URGENSI BERBAHASA SANTUN SEJAK USIA DINI

**Moh. Rosyid**

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

## **Abstract:**

*THE URGENCY OF POLITE LANGUAGE FROM THE EARLY AGE. Orality and literacy is the dynamics of language users in interaction. The main thing that should get extra attention by the language user from an early age is the use of polite language. Politeness is measured by speaking/writing that does not offend the listeners or readers, use the indirect speech is usually felt more polite when compared with the speech which is expressed directly. The use the language with an analogical word feels more polite when compared to plain words, the expressions using polishing language style feels more mannered in comparison with regular expressions. The politeness in speaking can be seen from the use of two things, i.e. the word choice (diction) or the appropriateness of the use of words and language style. The use of language, specifically in writing, since an early age is introduced with fundamental thing includes phonetics, semantics, syntax, morphology, pragmatics, and discourse. This study is a basis to understand the rules of the language in order to become a good and correct language user. The ultimate goal of this content is realizing a mannered language user as a distinctive of cultured human and the emergence of the veneration of others because the mannered of language itself.*

**Keywords:** *polite, communicative, obey the principle*

## **A. Pendahuluan**

Luasnya wilayah geografis dan ragamnya budaya yang jumlahnya sekitar 500 etnis merupakan karunia Ilahi bagi bangsa Indonesia. Keragaman itu karena manusia Indonesia perspektif antropologi linguistik mengelompokkannya dalam tiga kelompok populasi (pohon filogenetik). Kelompok pertama merupakan manusia Batak, Jawa, Tengger, Bali, Dayak, Minang, dan Melayu (Riau). Kelompok kedua, yakni Sasak, Makassar, Bugis, Sumba Timur, Kaili, Minahasa, dan Sumbawa. Kelompok ketiga,

manusia Alor dan Papua. Kelompok ketiga ini berbeda dengan kelompok pertama dan kedua karena nenek moyang kelompok ketiga yakni Aborigin Australia dan Papua yang lebih dulu menempati kepulauan Indonesia yakni 50.000 s.d 60.000 tahun lalu, disusul kedatangan para migran penutur Austronesia pada 5.000 s.d 2.000 tahun lalu. Pengembangan kelompok ketiga tersebut, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menyongsong pelaksanaan Festival Budaya Melanesia Internasional di Kupang 26-30 Oktober 2015 Indonesia selayaknya menjadi anggota definitif dalam kelompok negara berbasis ras Melanesia bersama Papua Niugini, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Fiji, dan Kaledonia Baru. Alasannya karena populasi ras Melanesia di luar provinsi bagian timur Indonesia berjumlah sekitar 13 juta jiwa lebih banyak dari total penduduk lima Negara di kawasan Pasifik Selatan yang berjumlah sekitar 9,5 juta jiwa. Kini Indonesia hanya sebagai negara anggota kehormatan. Melanesia adalah ras yang umumnya berkulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang lebih besar dan kuat, dan profil tubuh lebih atletis. Wilayah Indonesia yang berras Melanesia yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT. Populasi terbanyak yakni NTT 5 juta jiwa, Papua 3,5 juta, dan Maluku 1,8 juta (*Kompas*, 26 Oktober 2015).

Menurut Mulyana, bahasa di daratan Asia (Melayu, yang berwatak sama dengan bahasa Campa) dan Austronesia memiliki struktur bahasa yang hampir sama (*basic vocabulary*). Sebagian besar kata dan unsur bahasa Melayu berasal dari di daratan Asia Selatan dan Tenggara (1992:110). Anggapan semula bahwa bahasa Melayu Nusantara (cikal bakal bahasa Indonesia) berasal dari Melayu Deli, Sumatera. Tetapi berdasarkan penelitian Prof. Madya DR Haji Jalaludin tahun 1996 s.d 2000 dari Universitas Brunei Darussalam bahwa bahasa Melayu Nusantara berakar dari Melayu Sambas, Kalimantan. Bahasa Melayu di Indonesia dan bahasa serumpun dari Malaysia dan Brunei adalah bahasa Melayu Sambas. Bahasa Melayu purba memiliki empat intonasi (a, i, u, e) berada di Sambas, berkembang di Brunei menjadi tiga, berkembang di Sumatera menjadi enam, berkembang di Malaysia menjadi tujuh. Bahasa diwariskan dari zaman ke zaman. Hasil penelitian ini membantah penelitian sarjana Belanda yang menyebutkan bahasa Melayu Nusantara berakar dari Indochina (*Jawa Pos*, 31 Desember 2009).

Ragam bahasa, etnis, dan tebaran pulau tersebut masing-masing memiliki keunikan sebagai wujud dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang utuh. Potensi tersebut perlu *diuri-uri* supaya eksis agar prinsip *the fittest would survive* (individu inferior akan mati dan individu superior akan bertahan) tidak menerpa khazanah budaya kita. Langkah riil

yang kita lakukan adalah menghidupkan keanekaragaman etnis, budaya, dan khazanah lokal. Jika tidak, yang terjadi adalah konflik. Akan tetapi, bila ditinjau dari aspek kekayaan bahasa daerah, sebagaimana bahasa Jawa, para linguis (ahli bahasa) prihatin karena semakin menurunnya pemahaman dan sudah tidak familiernya bahasa Jawa bagi anak Jawa. Ada hal yang perlu didiskusikan atas pernyataan Mendiknas pada tahun 2011 bahwa masih tersisa 746 bahasa daerah di Indonesia. Bahkan diprediksi akhir abad ke-21 hanya 75 bahasa daerah yang bertahan. Bila prediksi itu benar-benar terjadi, kondisi bahasa daerah semakin merana, mengapa? Pertama, bahasa daerah digerogeti oleh bahasa nasional dan tidak dianggap bahasa ideal di rumah/keluarga. Kedua, imbas poin pertama, bahasa daerah sudah dianggap kuno dan basi dijadikan media komunikasi. Di sisi lain, di tengah muramnya kedudukan bahasa daerah dan bahasa ibu, setiap tanggal 21 Februari ditetapkan sebagai Bahasa Ibu sejak 17 November 1999.

Keprihatinan itu sudah disikapi sejak berlangsungnya Kongres Bahasa Jawa VI tahun 2007. Kongres menelan dana Rp 5 milyar muncul rekomendasi perlunya Perda bahasa Jawa sebagai payung hukum. Tujuan utamanya adalah agar bahasa Jawa lestari. Pada dasarnya upaya perdanisasi Bahasa Jawa mengiblat adanya Perda Bahasa Bali sejak tahun 2002 dan Perda Bahasa Sunda sejak tahun 2003. Tetapi, keberadaan Perda bahasa Jawa menuai kritik dari penelaah bahasa bahwa eksisnya bahasa Jawa tidak serta-merta dengan Perda, tapi kondisi bahasa Jawa (Tengah) heterogen, seperti dialek 'standar', dialek Banyumas dan Tegal. Berbeda dengan Bali dan Sunda yang bahasa daerahnya homogen, sehingga perda bahasa Jawa berbasiskan kabupaten/kota, bukan provinsi. Hal tersebut mengiblat fungsi bahasa daerah -termasuk bahasa Jawa- yang dirumuskan dalam seminar bahasa nasional pada tanggal 25-28 Februari 1975 sebagai lambang kebanggaan daerah, identitas daerah, alat perhubungan masyarakat daerah, pendukung bahasa nasional, bahasa pengantar di sekolah, dan alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

Satu hal yang melegakan, bahasa Jawa telah menjadi mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah (saat itu) Mardiyanto Nomor 895.5/01/2005 tanggal 23 Februari 2005. Bahasa Jawa sebagai mata ajar pada jenjang wajib belajar di Jawa Tengah. Dengan SK tersebut, Bupati Blora saat itu, Yudhi Sancoyo, mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 4343/5668 tentang Penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pemerintahan dan umum. Pengkaji bahasa Jawa melihat, ternyata hanya dengan Keputusan

Gubernur diperlukan produk hukum penguat yakni perda bupati. Aspek lain yang perlu ditelaah bahwa proses pembelajaran Bahasa Jawa menghadapi kendala yakni belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dengan indikator lembaga pendidikan dan dinas pendidikan menghadapi permasalahan dalam hal kurikulum, buku ajar, semangat siswa yang belum optimal, dan kurang kualitasnya pendidik karena tidak *link and match*. Problem ini harus disikapi oleh pemerintah dan masyarakat dengan bijak. Penyelesaiannya dapat ditindaklanjuti dengan pembelajaran bahasa yang santun. Kesantunan sebagai cerminan diri penutur/penulis yang berwatak dan berbudaya.

## B. Pembahasan

Bila kita telaah sepintas, terutama ilmuwan yang belum mengkaji ilmu bahasa (linguistik) secara utuh, muncul anggapan bahwa ilmu bahasa mengkaji hal-hal yang normatif, monoton, tidak berkembang, bahkan menjenuhkan. Hal tersebut muncul karena materi ajar bahasa Indonesia telah diberikan kepada siswa sejak pada bangku wajib belajar hingga perguruan tinggi (calon sarjana). Pernyataan tersebut terbantahkan jika kita mendalami ilmu bahasa (Indonesia) tidak sepotong-potong karena ilmu bahasa mengkaji hal mendasar meliputi fonetik, semantik, sintaksis, morfologi, pragmatik, dan wacana. Dalam aspek hukum, dengan diterbitkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sehingga kedudukan bahasa semakin kokoh.

### 1. Kepunahan Bahasa

Ragamnya bahasa etnis di Indonesia terbagi atas rumpun Austronesia dan non-Austronesia. Rumpun bahasa itu terancam punah karena rumpun non-Austronesia di wilayah Indonesia bagian timur ditinggalkan oleh penuturnya karena urbanisasi dan perkawinan antaretnis. Menurut Kapuslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Abdul Rachman Patji, karena jarang digunakan. Pada akhir abad ke-21 diperkirakan hanya sekitar 10 persen bahasa etnis yang bisa bertahan, terdapat 169 bahasa etnis yang terancam punah (*Kompas*, 16 Desember 2011). Diperkirakan 90 persen dari 6.500 bahasa di dunia akan hilang di akhir abad ke-20. Di Indonesia, diperkirakan hanya akan tersisa 75 bahasa dari 746 bahasa yang bertahan di akhir abad ke-20. Penyebabnya adalah situasi perang, bencana alam, urbanisasi, dan kawin campur. Data tahun 1990, hanya 15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang berbahasa ibu bahasa Indonesia (*Kompas*, 20 Agustus 2011). Berbeda dengan punahnya bahasa di Amerika Selatan dikarenakan



penjajahan dan kondisi geografis benua. Amerika Selatan memiliki lebih dari 30 rumpun bahasa, bila dibandingkan dengan gabungan rumpun bahasa di Afrika, Asia, dan Eropa hanya 21 rumpun (*Kompas*, 2 Januari 2011).

Potensi Nusantara di bidang bahasa jika tidak dirawat, nasibnya akan tragis, sebagaimana kepemilikan bahasa daerah yang sedikitnya 10 bahasa daerah di Papua dan Maluku Utara ditengarai punah dan 32 lainnya terancam punah. Hasil penelitian Frans Rumbrawer tahun 1999, 9 bahasa di Papua sudah punah yakni bahasa Bapu, Darbe, dan Wares di Kabupaten Sarmi, bahasa Taworta dan Waritai di Kabupaten Jayapura, bahasa Murkim dan Walak di Kabupaten Jayawijaya, bahasa Meoswar di Kabupaten Manokwari, bahasa Loengenyem di Kabupaten Raja Ampat, dan bahasa Ibu di Maluku Utara. Bahkan 32 bahasa daerah terancam punah karena jumlah penuturnya tersisa 2 hingga 100 orang yakni bahasa Bonerif, Foya/Foja, Itik, Liki, Mander, Marengi, Massep (Potafa), Pawi, dan Yoki di Kabupaten Sarmi, sedangkan bahasa Usku, Narau, Kapori, Tafanma, Dabra, dan Kwerisa di Kabupaten Jayapura. Bahasa Kofei, Sauri, Awera, Burate, Tafaro, Worja, dan Saponi di Kabupaten Waropeng. Bahasa Pyu, Kosare, dan Kembra di Kabupaten Jayawijaya. Barbara F. Grimes (1988) menyebutkan terdapat 672 bahasa daerah di seluruh Nusantara, tersebar di Papua 249 bahasa, di Maluku 134 bahasa, di Sulawesi 105 bahasa, di Kalimantan 77 bahasa, di Nusa Tenggara 54 bahasa, di Sumatera 38 bahasa, di Jawa dan Bali 15 bahasa. Hasil penelitian Pusat Bahasa sejak 1991 s.d 2008, baru memetakan 442 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah punah, menurut Dendy Sugono karena jumlah penuturnya menyusut jumlahnya hingga kurang dari 100 orang (dikategorikan terancam punah) atau habis (punah). Kunci memertahankan bahasa daerah berada di tangan penutur bahasa daerah dan pemerintah daerah dengan mengajarkan bahasa daerah kepada anak sebagai bahasa ibu (bahasa yang pertama kali dipelajari) sebelum bahasa nasional dan bahasa asing (*Kompas*, 26 Juli 2011).

Analisis Unesco, diperkirakan 2.500 bahasa di dunia terancam punah, dari 6.000 bahasa dunia yang masih aktif dipakai pengguna bahasa. Diprediksi, pada akhir abad 21, bahasa daerah di dunia diperkirakan tersisa 10 persen. Agar bahasa tidak punah, solusi yang dilakukan Unesco dengan membuat atlas bahasa dunia dan menjadikan tanggal 21 Februari sebagai hari bahasa ibu internasional (*International Mother Language Day*). Sejarah penetapan bahasa ibu diabadikan dalam bentuk monumen di Bangladesh yang dikenal dengan monumen martir atau *Shaheed Minar* yang bertempat di kampus Universitas Dhaka, sebagai bentuk mengenang pengorbanan

bahasa Bangla pada tanggal 21 Februari 1952 (Rahardi, 2009). Dengan demikian, untuk meredam punahnya bahasa sekaligus mengingatkan langkah pemerintah melalui Pusat Bahasa yang berada di bawah naungan Kemendikbud agar mengayomi dan menghidupkan bahasa dengan berbagai langkah ideal, seiring peradaban dunia melalui dunia pendidikan.

## 2. Kongres Bahasa

Pemerintah dalam mewujudkan terpeliharanya bahasa Indonesia yang utuh, langkah di antaranya melaksanakan kongres bahasa yakni pertemuan para ahli bahasa Indonesia, ilmuwan, tokoh masyarakat dan lainnya untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kongres I diadakan di Solo pada tahun 1938. Kongres II di Medan pada tahun 1954 dan kongres berikutnya di Jakarta. Kongres III tahun 1978, kongres keempat tahun 1983, kongres V tahun 1988, kongres VI tanggal 28 Oktober s.d 2 November 1993 yang menyepakati agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, dan mengusulkan disusunnya UU Bahasa Indonesia. Kongres VII tanggal 26-30 Oktober 1998 yang mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa, bertugas memberikan nasihat kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (PPPB) serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan (PPPB) yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pakar yang peduli terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Kongres VIII tanggal 14 s.d 17 Oktober 2003, dan Kongres IX tanggal 28 s.d 1 November 2008.

Kongres I memutuskan: (1) kedudukan bahasa: bahasa Indonesia diusulkan menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam badan perwakilan dan perundang-undangan, (2) pengembangan bahasa: ejaan yang berlaku dipertahankan, tetapi pembauran ejaan perlu dipertimbangan, ejaan internasional perlu diajarkan di sekolah, tata bahasa baru yang adikuat harus disusun, (3) pembinaan bahasa: bahasa persuratkabaran harus diperbaiki, pendirian Institut Bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan (di berbagai PTN eks-IKIP, terdapat fakultas bahasa Indonesia, begitu pula sebagian PTU (Perguruan Tinggi Umum), pendirian Fakultas Sastra dan Filsafat perlu dipikirkan.

Kongres II memutuskan: (1) kedudukan bahasa: politik bahasa harus mengatur kedudukan dan hubungan timbal-balik antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing, membangkitkan rasa cinta bahasa dan rasa harga diri, dan dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu disesuaikan pertumbuhan masyarakat, (2) pengembangan bahasa: rencana

penyusunan buku logat (lafal) Indonesia, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia berdasarkan prinsip fonemis yang diresmikan UU, penyusunan tata bahasa normatif Indonesia untuk Sekolah Dasar dan menengah dalam jangka pendek, penyusunan tata bahasa deskriptif lengkap yang dilindungi UU dalam jangka pendek, pengembangan tata istilah bersumber bahasa internasional dan bahasa daerah, penyempurnaan ragam bahasa administrasi dan perundangan-undangan, bahasa ilmiah, bahasa pergaulan, serta bahasa kesusastraan, dan (3) pembinaan bahasa: diadakannya mimbar kuliah bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa negara tetangga, bahasa Arab, Tionghoa, dan Sanskerta, pendirian jawatan penerjemahan negara, pembentukan lembaga penyusunan kamus etimologi (Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna), pembentukan lembaga bahasa Indonesia untuk pengembangan dan pembinaan (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2005 tanggal 18 November 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Depdiknas Pasal 56 tentang Pusat Bahasa. Pusat bahasa bertugas menangani pengelolaan bahasa dan sastra Indonesia berdiri tahun 1947 dengan nama *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek*, tahun 1952 berubah nama menjadi *Lembaga Bahasa dan Budaya*, tahun 1959 menjadi *Lembaga Bahasa dan Kesusastraan*, tahun 1966 menjadi *Direktorat Bahasa dan Kesusastraan*, tahun 1969 menjadi Lembaga Bahasa Nasional, tahun 1975 menjadi *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, dan tahun 2000 bernama *Pusat Bahasa*), pembentukan balai penerjemah sastra dunia, daerah, India, Persi, dan Arab, pengembangan perpustakaan umum dan sekolah, penggalakan penulisan buku keahlian yang disertai penghargaan menarik, serta usaha pembimbingan pertumbuhan bahasa Indonesia dan usaha menjadi bahasa ibu bangsa Indonesia.

Kongres III memutuskan: (1) umum: kemahiran bahasa Indonesia harus menjadi salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian dan kongres kebudayaan nasional yang akan menggariskan berbagai kebijakan di bidang kebudayaan; (2) pengembangan bahasa: penyusunan pedoman lafal baku, peningkatan kaidah ejaan dan lafal baku, prioritas penyusunan tata bahasa yang menggambarkan norma bahasa, penerbitan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi pertama tahun 1988 memuat 62.100 lema (kata masukan), edisi kedua (1991) memuat 68.000 lema, edisi ketiga (2001) memuat 78.000 lema, sedangkan edisi keempat tahun 2008 terdiri 90.000 lema dengan 1701 halaman), penggalakan kemodernan bahasa menyangkut peristilahan dan pengembangan ragam,

standarisasi sistem bilangan Indonesia baru berdasarkan sistem bilangan Anglo-Sakson dan Perancis; (3) pembinaan bahasa: pembentukan Dewan Nasional Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, penggalakan Badan Penerjemah Nasional demi kecerdasan rakyat, penulisan buku pelajaran asli bermutu yang memperhatikan latar budaya siswa yang berbeda, meningkatkan penataran guru bahasa dan pengembangan metode pengajaran bahasa, termasuk bahasa asing, mengutamakan keterampilan mengarang, dan pembinaan bahasa daerah perlu diberi tempat dan waktu yang wajar dalam kurikulum.

Kongres IV menyimpulkan dan usulan tindak lanjut dalam masalah bidang bahasa, pengajaran bahasa, dan pembinaan bahasa dalam kaitannya dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional yaitu (1) sarana komunikasi pemerintah dan kemasyarakatan, (2) sarana pengembangan kebudayaan, (3) sarana pendidikan dan pengajaran, termasuk wajib belajar, dan (4) sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kongres V diadakan tanggal 28 Oktober 1988 dibuka Presiden Soeharto dengan 76 makalah (ENI, 2004:104)

### 3. Dinamika Berbahasa

Perlu memahami definisi (batasan) bahasa yakni sistem tanda bunyi yang secara manasuka (*arbitrer*) dipergunakan oleh anggota masyarakat atau kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Pertama, sebagai sistem, bahasa bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan. Unsur bahasa diatur seperti pola yang berulang, bahasa dapat diuraikan atas satuan terbatas, berkombinasi dengan kaidah, dan terdiri beberapa subsistem yakni fonologi (bidang dalam linguistik (bahasa) yang menyelidiki bunyi bahasa menurut fungsinya), gramatika (tata bahasa), dan leksikon (dengan istilah lain kosakata, kamus sederhana, atau kekayaan kata yang dimiliki suatu bahasa atau daftar istilah dalam suatu bidang disusun menurut abjad dan dilengkapi dengan keterangan atau komponen bahasa yang memutar semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa). Seperti kata *Ibu mem....dua ekor....* Kita dapat menduga bunyi kalimat secara keseluruhan yakni *Ibu membeli dua ekor ayam*. Kedua, sistem tanda adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu atau yang menimbulkan reaksi yang sama bila orang menanggapi (melihat, mendengar) apa yang diwakilinya. Tanda itu dipergunakan berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Ketiga, bahasa berkaitan dengan segala aspek kehidupan dan alam

sekitar pemakainya (bahasa sebagai sistem makna). Keempat, karena bahasa merupakan sistem lambang, bahasa bersifat konvensional. Kelima, bahasa itu sistem bunyi, beberapa jenis huruf merupakan turunan bunyi. Keenam, bahasa bersifat *arbitrer* maknanya tidak ada hubungan wajib antara satuan bahasa dengan yang dilambangkannya. Ketujuh, bahasa bersifat produktif, menerima (responsif) dengan bahasa baru. Kedelapan, bahasa bersifat unik, memiliki kekhasan dibanding bahasa lain. Kesembilan, sebaliknya, kesamaan bahasa dimiliki oleh bahasa lain. Kesepuluh, bahasa itu beragam, tersebar di negara, suku, dan komunitas (ENI, 2004:52).

Dengan ragam itu muncul klasifikasi bahasa (pengelompokan bahasa dunia) berdasarkan persamaan ciri tertentu yang dimiliki sejumlah bahasa dengan tiga cara (1) klasifikasi genetis; pengelompokan berdasarkan hubungan geneologis antara bahasa yang dianggap berasal dari bahasa yang sama, (2) klasifikasi tipologis; pengelompokan berdasarkan ciri struktur bahasa, dan (3) klasifikasi areal; pengelompokan berdasarkan kedudukan geografis bahasa. Klasifikasi genetis menunjukkan hubungan kekerabatan secara historis. Berdasarkan ciri tersebut, bahasa dunia dibagi (1) bahasa Indo-Eropa, (2) bahasa Afro-Asia, (3) bahasa Sino-Tibet, (4) bahasa Altaika, (5) bahasa Dravida, (6) bahasa Austro-Asiatik, (7) bahasa Fino-Ugrika, (8) bahasa Chari Nil, (9) bahasa Melayu Polinesia, (10) bahasa Kaukasus, dan (11) bahasa Indian (ENI, 2004:4).

Perlu pula memahami fungsi bahasa sebagai alat komunikasi berupa (1) ekspresif yakni menyampaikan perasaan, pikiran, kehendak/sikap (simbolik, kognitif-afektif), (2) alat komunikasi argumentatif yakni menyampaikan pengetahuan sebagai buah pengetahuan beserta jalan pikiran yang melatarbelakanginya, (3) eksploratif bahwa penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan, (4) persuasi, penggunaan bahasa yang bersifat mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik, dan (5) entertainmen yakni penggunaan bahasa untuk menghibur, menyenangkan atau memuaskan perasaan batin (Chaer:1990), juga kognitif yakni pengguna bahasa dapat menyampaikan isi pikiran. Fungsi tersebut tidak dapat berperan maksimal tanpa mengkaji konsep bahasa, di samping bahasa senantiasa berkembang dan berubah karena penambahan (perbendaharaan) kata sesuai dinamika pengguna bahasa, hal ini sebagai wujud hakikat bahasa yang hidup yang dapat dibuktikan dengan penggunaan kata atau istilah baru (adopsi) digunakan dalam komunikasi lisan maupun tulisan, hal tersebut terekam dalam penggunaan kata atau istilah baru dalam kamus.



Fungsi bahasa menurut Halliday (1) instrumental (*the instrumental function*) yakni menyebabkan peristiwa tertentu terjadi, (2) regulasi (*the regulatory function*), bertindak untuk mengawasi dan mengendalikan peristiwa, (3) pemberian (*the representational function*) yakni penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan, fakta dan pengetahuan, menjelaskan, menggambarkan, dan memberikan realitas (*to represent*), (4) interaksi (*the interactional function*) bertugas menjamin dan memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi dan interaksi sosial menuntut pengetahuan secukupnya mengenai logat, logat khusus (jargon), lelucon, cerita rakyat (*folklore*), adat-istiadat dan budaya setempat, tata krama pergaulan dsb., (5) personal (*the personal function*), memberi kesempatan kepada seorang pembicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi pribadi, serta reaksi yang mendalam, (6) heuristik (*the heuristic function*), melibatkan penggunaan bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, (7) imajinatif (*the imagination function*), melayani penciptaan sistem atau gagasan bersifat imajinatif (Kinayati, 2006:42).

Adapun fungsi bahasa Indonesia kedudukannya sebagai bahasa nasional sebagai (1) lambang kebanggaan kebangsaan, (2) lambang identitas nasional, (3) alat perhubungan antarwarga, antardaerah, dan antarbudaya, dan (4) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku berbangsa. Melalui nilai itu bangsa Indonesia terasah rasa kebangsaannya. Dengan fungsi kebanggaan itu, diharapkan segenap anak bangsa bersedia menjaga, memelihara, dan mengembangkan bahasa Indonesia. Sebagai lambang identitas nasional -selain bendera dan lambang Garuda Pancasila-, bahasa Indonesia kita harapkan mampu mewakili jati diri bangsa Indonesia. Melalui fungsi ini kita diharapkan mampu menjaga bahasa Indonesia yang beridentitas sehingga tidak larut dengan pengaruh dari luar, meskipun tetap pada posisi tidak menutup diri. Fungsi berikutnya adalah sebagai bahasa nasional yaitu alat perhubungan antarsuku bangsa dan fungsi pemersatu.

Kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi (1) digunakan pada peristiwa kenegaraan, seperti segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan (lisan maupun tulis), penulisan dokumen negara, surat kenegaraan, dan pidato kenegaraan, (2) bahasa pengantar di lembaga pendidikan, untuk komunikasi, mentransfer ilmu, dialog persoalan pendidikan, dsb., (3) sebagai alat perhubungan tingkat nasional, seperti

perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya, dan (4) sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seperti menyatakan nilai budaya dan nilai sosial yang kita miliki (Doyin dan Wagiran, 2009:5). Adapun jenis penggunaan bahasa meliputi (1) bahasa nasional adalah dialek regional yang menjadi standar atau *lingua franca*, diakui sebagai bahasa persatuan karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa, atau ketetapan perundang-undangan (Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 (2) bahasa NKRI adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Pasal 2 pengaturan bahasa sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan NKRI), (2) bahasa persatuan adalah bahasa yang dianggap sebagai faktor menyatukan masyarakat secara politis dan kultural, (3) bahasa purba adalah bahasa hipotesis (dugaan) yang dianggap menurunkan beberapa bahasa yang nyata-nyata ada. Misalnya, bahasa Proto-Austronesia adalah bahasa purba dari bahasa pribumi di Taiwan, Indonesia, Madagaskar sampai Lautan Pasifik, (4) bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan komunikasi resmi, seperti perundang-undangan dan surat dinas, (5) bahasa siul adalah pola bahasa yang hubungan sintaksisnya diungkapkan dengan siul. Cara komunikasi tersebut terdapat pada bangsa Indian Mazatek di Meksiko, (6) bahasa standar adalah ragam bahasa yang dipakai dalam situasi resmi dan dianggap paling baik, seperti dalam perundang-undangan dan berbicara di depan umum atau dengan orang yang dihormati, dan bahasa persatuan dalam masyarakat yang mempunyai banyak bahasa, (7) bahasa umum adalah (1) bagian dari khazanah leksikal, gramatikal, dan stilistik (Stilistika adalah tata bahasa meliputi kebiasaan atau ungkapan pemakaian bahasa yang mempunyai efek kepada pembacanya (menyelidiki pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan gaya bahasa) (KBBI, 2008:461). suatu bahasa yang dimengerti dan diterima sebagai pemakaian yang baik oleh semua orang yang mengenal bahasa itu. Tidak termasuk di dalamnya: ragam kesusastraan dan ragam teknis yang hanya dimengerti oleh orang yang mendapat latihan khusus, ragam substandar dan ragam yang tidak diterima untuk komunikasi serius, dan unsur khusus dari dialek regional atau sosial, (2) ragam bahasa yang dipakai oleh sebagian besar pemakai bahasa dalam situasi sehari-hari, (8) bahasa modern adalah dialek temporal yang dipergunakan pada saat ini, untuk membedakannya dengan bahasa kuno atau bahasa klasik, (9) bahasa kedua adalah bahasa yang dikuasai seseorang sesudah bahasa ibu dan tidak ada keharusan mempelajarinya dalam masyarakat bahasa. Bahasa kedua sebagai bahasa resmi, (10) bahasa asing adalah bahasa yang dikuasai oleh

pemakainya melalui pendidikan formal (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33 (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik), (11) bahasa bangsawan adalah ragam bahasa Melayu yang dipakai bangsawan di istana, (12) bahasa daerah adalah bahasa yang dipergunakan penduduk asli suatu daerah (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33 (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu), (13) bahasa dalam adalah ragam bahasa Melayu yang dipakai untuk menyapa raja atau keluarganya, (14) bahasa hidup adalah bahasa yang masih dipakai oleh masyarakat bahasa, (15) bahasa ibu (bahasa pertama) adalah bahasa yang dikuasai oleh seseorang sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, (16) bahasa imigran adalah bahasa ibu suatu kelompok minoritas pendatang dalam suatu masyarakat bahasa. Seperti, bahasa Hokkian di Indonesia, (17) bahasa induk adalah satu dari kelompok bahasa berkerabat yang menurunkan bahasa lain. Misalnya, bahasa Latin yang dianggap menurunkan bahasa Romantika, seperti bahasa Perancis, Italia, dan Rumania, (18) bahasa jawi adalah nama kuno untuk bahasa Melayu, khususnya yang ditulis dengan huruf Arab (*pegon*), (19) bahasa klasik adalah dialek temporal suatu bahasa yang dianggap mewakili jumlah perkembangan kebudayaan pemakainya dan mempunyai kesusastraan yang penting. Contoh: bahasa Latin Klasik, bahasa Melayu Klasik, dan bahasa Arab, (20) basa *kedhaton* adalah ragam bahasa Jawa yang khusus dipakai di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Kadang-kadang bahasa itu digunakan dalam pedalangan, dan (21) basa *bagongan* adalah jenis basa *kedhaton* yang masih dipakai di Keraton Yogyakarta. Bahasa ini mempunyai ciri gramatikal agak khusus dan mempunyai 11 kata khusus yaitu *enggeh*: ya, *punapi*: apa, *puniki*: ini, *puniku*: itu, *seos*: beda, *wenten*: ada, dsb. (ENI, 2004:52), meskipun eksistensi bahasa tersebut tidak semuanya eksis hingga kini.

Dengan berbahasa yang baik dan benar, diharapkan tercipta pola berpikir yang deduktif (proses berpikir dengan menyimpulkan hal atau sifat yang khusus dari gejala umum), divergen (berpikir dengan cara membuat pemecahan masalah atau relevansi ketepatan jawaban), induktif (proses berpikir dengan menyimpulkan berbagai macam hal atau gejala yang khusus menjadi sesuatu aturan atau hukum yang umum), konvergen (memberi jawaban paling tepat/benar), dan kreatif (mendapatkan jawaban dengan cara/pola baru). Di sisi lain, agar dipahami cara berbahasa yang baik dan

benar, perlu didasari dengan memahami penggunaan bahasa yang santun sejak usia anak-anak (usia dini).

#### 4. Kesantunan Berbahasa

Berbahasa secara santun bagi seseorang akan menjaga harkat dan martabat dirinya dan menghormati orang lain. Mampu bertutur kata secara halus dan isi tuturan katanya memiliki maksud yang jelas dapat menyejukkan hati dan membuat orang lain berkenan. Hal ini merupakan dambaan setiap orang. Imbasnya, kebencian rasa curiga, sikap prasangka buruk terhadap orang lain tidak perlu ada. Kesantunan berbahasa dengan prinsip empanpapan, menjaga perasaan mitra bicara, mawas diri, dan kontekstual dengan mitra bicara, misalnya, penggunaan bahasa Jawa kata 'panjenengan' dengan orang yang lebih senior (tua), sedangkan dengan usia sebaya dengan kata 'sampeyan' (Pranowo, 2009). Bila pengguna bahasa sudah tidak lagi mengindahkan aturan main berbahasa yang santun, maka dapat dijadikan data tambahan pembenar bahwa kerusakan kehidupan yang diprediksi leluhur masa lalu terbukti, sebagaimana dalam Serat Kalatida karya Ranggawarsita merupakan naskah kuno tahun 1860-an. Pada bait I dan II yang terjemahannya: *Mangkya darajating praja* (kesadaran negara saat ini) *kuwuryan wus sunya ruri* (terlihat semakin merosot) *rurah pangrehing ukara rusak* (tatanan dan aturannya) *karana tanpa palupi* (oleh sebab tiada yang dapat dicontoh) *atilar silastuti* (semua sudah meninggalkan etika) *sujana sarjana kelu kalulun kala tidha* (orang baik, orang pintar terbelenggu zaman yang serba tidak tentu) *tidhem tandhaning dumadi* (suasana kehidupan mencekam) *hardayeng rat dening karoban rubeda* (sebab dunia penuh godaan). *Ratune ratu utama* (sesungguhnya rajanya termasuk raja yang baik) *patihe patih linuwih* (patihnya juga cerdas) *pra nayaka tyas raharja* (semua pegawai hatinya baik) *panekare becik-becik* (pemuka masyarakat juga baik) *parandene tan dadi* (tetapi semua itu tak mampu menciptakan kebaikan) *paliyasing kala bendu* (oleh karena jaman penuh kerusakan) *malah mangkin andadra* (bahkan kerusakan semakin menjadi) *rubeda kang ngreribeti* (gangguan yang selalu membikin susah) *beda-beda hardane wong sanagara* (lain orang lain pikiran dan maksudnya). Pada bagian selanjutnya tertulis jangka atau pandangan Ronggowarsito tentang zaman edan : *sakbeja-bejane wong kang lali, luwih beja kang eling lan waspada* (seberuntung orang yang lupa, masih beruntung orang yang ingat/sadar dan waspada).

## 5. Pengenalan Bahasa Santun

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar menjadi pengguna bahasa yang baik dan benar, bukan benar dan baik. Bahasa Indonesia yang baik dan benar (BIBB) adalah bahasa yang memiliki karakter, yaitu kemampuan, kualitas, dan validitas sehingga mampu berfungsi sebagai sarana komunikasi. Selain itu, memiliki kualitas yang membedakannya dari bahasa lain dan efektif dalam formalisasi yang tepat. BIBB memiliki validitas, yaitu efektivitas dalam formalitas secara tepat. Formalitas mengacu pada kaidah, bentuk, dan konvensi. BIBB memiliki dua varian yakni bahasa santun (*distant language*) dan bahasa rendah atau bahasa akrab (*close language*). Bahasa Indonesia yang santun mengacu ke tuturan formal, contoh: *Saya mengucapkan terima kasih*, tuturan tak langsung, contoh: *Pendapat bapak baik tapi mohon dipertimbangkan lagi*. Bahasa Indonesia yang akrab mengacu ke tuturan informal, contoh: *Makasih ya*, mengacu pada tuturan langsung, contoh: *Aku nggak setuju*, dan tuturan literal, contoh: *WC* atau *toilet*. Contoh tuturan yang disingkat, contoh: *Tks, ya*. Contoh bahasa slang: *Gue banget*, bentuk dibolak-balik, contoh: *Kamsia(h) ya/makasih ya*, sumpah serapah: *sialan lu*. Ketidaksantunan berbahasa manakala bahasa Indonesia akrab digunakan dalam situasi santun/formal atau bahasa santun digunakan dalam situasi akrab/informal (*awkward situations*). Pengajaran bahasa Indonesia selama ini hanya diarahkan pada aspek formal (benar secara gramatikal) sehingga peserta didik mencari dari sumber lain. Selama ini, pembelajaran hanya diarahkan pada formalisme atau benar secara gramatikal, bukan pada fungsional atau baik secara interpersonal. Formalisme adalah masalah linguistik, fungsionalisme masalah pragmatik, yaitu sesuai dengan teori tindak tutur dan teori kesantunan sebagai bagian dari tindakan manusia (Jumanto, 2014). Teori kesantunan menurut para ahli bahasa yang dianalisis Jumanto, berawal dari teori 'muka' dalam diri manusia, untuk berinteraksi interpersonal atau interaksi sosial. Muka mengacu harga diri seseorang sehingga interaksi sosial harus mempertimbangkan manajemen muka (*face management*) sehingga muka orang lain dan muka sendiri tidak terancam atau rusak (Jumanto, 2015:6). Dengan demikian, perlu dipaparkan bentuk bahasa santun, cara berbahasa santun, dan strategi berkomunikasi agar santun.

### a. Bentuk Bahasa Santun

Bentuk bahasa terpilah atas bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Bahasa verbal adalah bahasa yang diungkapkan dengan kata-kata yang berbentuk ujaran, ungkapan atau tulisan. Bahasa nonverbal berupa



mimik (raut wajah/muka), gerak tubuh, sikap, atau perilaku yang mendukung pengungkapan kepribadian seseorang. Struktur bahasa santun disusun oleh penutur/penulis yang tidak menyinggung perasaan pendengar atau pembaca (Pranowo, 2009:3).

b. Cara Berbahasa Santun

Pemakaian bahasa terasa semakin santun, penutur dapat menggunakan bentuk yang dapat dirasakan sebagai bahasa santun, yakni (1) menggunakan tuturan tidak langsung yang biasanya terasa lebih santun bila dibandingkan dengan tuturan yang diungkapkan secara langsung. Misalnya: (a) Bawa ke sini, tas yang ada di meja Anda itu! (kurang santun), (b) Tas di meja Anda itu milikku, tolong ambikan dan bawa ke sini (pemakaian kata 'tolong' terasa lebih santun), (c) Maaf Pak, tas di meja itu mengganggu Bapak (sambil menjulurkan tangan ke arah mitra tutur (menggunakan kata 'maaf', tidak menyuruh, tetapi menjulurkan tangan ke arah mitra tutur, suruhan tak langsung terasa lebih santun lagi), (2) pemakaian bahasa dengan kata kias terasa lebih santun bila dibandingkan dengan pemakaian bahasa dengan kata lugas. Misalnya, jika tidak sependapat dengan orang lain, orang Batak selalu mengungkapkan perasaannya dengan kasar (tidak santun karena menggunakan kata lugas 'kasar'), (3) ungkapan memakai gaya ahasa penghalus terasa lebih santun dibandingkan dengan ungkapan biasa. Misalnya: Badanmu sekarang kok Nampak kurus, apakah baru sakit? (kurang santun karena menggunakan ungkapan biasa dengan kata 'kurus'). Badanmu sekarang nampak lebih langsing, apakah baru sakit? (lebih santun karena menggunakan gaya bahasa eufimisme) (Pranowo, 2009:2-4).

c. Strategi Berkomunikasi agar Santun

Kesantunan berujar dapat dilihat dari penggunaan dua hal, yakni pilihan kata (diksi) dan gaya bahasa. Pilihan kata maksudnya adalah ketepatan pemakaian kata untuk mengungkapkan makna dan maksud dalam konteks tertentu sehingga menimbulkan efek tertentu pada mitra tutur. Sebagaimana contoh berikut ini: (1) Siapa yang menutup jalan, 'tangkap'! Karena demokrasi tidak menutup jalan, (2) Jika Ahmadiyah tidak ingin diprotes MUI dan umat Islam, sebaiknya bentuk saja agama baru dan 'jangan' menggunakan nama Islam, (3) Namun, karena tempatnya terbatas kami 'mohon' pengertian dari teman-teman wartawan yang ingin mengambil gambar. Pilihan kata 'tangkap, jangan, dengan mohon' memiliki makna pembeda kesantunan (Pranowo, 2009:16).

## 6. Pengenalan Praktek Berbahasa pada Anak Usia Dini

Beberapa hal yang harus dikenalkan pada pengguna bahasa kaitannya dengan konsep bahasa yang digunakan berinteraksi secara lisan, antara lain dialek dan standar berbahasa (berbahasa yang baik dan benar).

### a. Idiolek, Aksen, dan Dialek

Kedudukan bahasa sebagai media komunikasi dikenal istilah idiolek (ciri khas bahasa seseorang, seperti akhiran pernyataan: ya kan...), aksen/logat (cara penutur mengucapkan bunyi bahasa, seperti aduh...waduh...), dan dialek. Dialek adalah variasi bahasa menurut pemakainya karena diri, kedaerahan, atau kelompoknya. Dialek kelompok (dialek sosial atau sosiolek), misalnya, dialek Priangan (Sunda), dialek Solo (Jawa), dialek Banyumasan meliputi wilayah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Tegal, Brebes, Pemalang, Kebumen, dan pesisir Cirebon (Indramayu), dsb. Ilmu yang mengkaji dialek disebut dialektologi. Menurut Nadra dan Reniwati, berdasarkan kelompok pemakaiannya, dialek dibedakan atas tiga jenis, yakni dialog regional, sosial, dan temporal. Dialek regional merupakan variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal (tempat) dalam suatu wilayah bahasa. Dialek sosial merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh golongan masyarakat tertentu. Dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok bahasawan (pengguna bahasa) yang hidup pada waktu tertentu (2009: 2). Untuk membedakan antara bahasa dengan dialek, terdapat tolok ukur pembedanya, yakni saling memahami, berupa tuturan, sikap penutur, beberapa faktor yakni geografis, politis, historis, budaya, dan otonomi (Nadra dan Reniwati, 2009; 14).

Menurut Mahsun, sebagai disiplin ilmu yang mengkaji perbedaan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan faktor geografis, sehingga membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang ilmu geografi untuk pemetaan area. Perbedaan unsure kebahasaan dalam suatu bahasa, sehingga memunculkan perbedaan yang bersifat dialectal dan subdialektal yang terjadi tidak secara serentak, tetapi melalui perkembangan yang panjang yang dialami oleh penutur bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, pembentukan dialek berkaitan dengan sejarah yang dialami oleh penutur bahasa itu sendiri. Adapun unsur kebahasaan mencakup semua bidang termasuk dalam kajian linguistik, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, dan semantik (1995: 20-23).

b. Standar Berbahasa yang Benar

Standar berbahasa yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang menaati kaidah tata bahasa (taat asas), sedangkan yang dimaksud bahasa yang baik dalam konteks ini adalah dalam bahasa Jawa dikenal *unggah-ungguh* yakni berbahasa sesuai dengan situasi pemakainya seperti situasi resmi, tidak resmi, dsb. Situasi resmi misalnya sambutan kenegaraan (Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan media massa (UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 [3]). UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional), sambutan sebagai pimpinan lembaga. Sedangkan situasi tidak resmi misalnya percakapan. Indikator penggunaan bahasa yang baik atau tepat adalah penggunaan bahasa yang serasi menurut golongan penutur. Menurut Sugono (1989) berdasarkan penutur bahasa, ditemukan ragam bahasa daerah (dialek atau logat), ragam bahasa terpelajar, ragam bahasa resmi, dan ragam bahasa tidak resmi (Sabariyanto, 2001:1), sedangkan menurut Chaer, ragam bahasa bersifat perseorangan, anggota masyarakat pada wilayah tertentu, anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu, digunakan dalam bidang tertentu, dan digunakan dalam situasi formal/resmi atau informal/tidak resmi (Chaer, 2006:3). Memahami karakter berbahasa ini merupakan kata kunci yang harus diberikan pemahaman pada pengguna bahasa sejak usia dini agar menjadi penutur yang santun.

## 7. Membekali Dasar Kajian Bahasa

Kajian dalam bahasa mendalami hal-hal mendasar meliputi fonetik, semantik, sintaksis, morfologi, pragmatik, dan wacana. Kajian ini diberikan pada anak mulai usai di bangku SLTP. Pertama, fonetik; (*phonetics*) adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji dasar fisik bunyi bahasa dan alat (komponen) organiknya. Kajian ilmu fonetik, dalam analisis Marsono mengulas jenis hasil bunyi bahasa, terjadinya bunyi bahasa, alat-alat bicara yang menghasilkan bahasa, fungsi dan cara kerja alat bicara, klasifikasi bunyi bahasa, klasifikasi vokal, konsonan, pengaruh bunyi, dsb. (Marsono, 1999). Kedua, semantik adalah ilmu bahasa yang mengkaji makna bahasa. Kajian makna tersebut dalam ulasan Chaer mengulas makna dari segi jenis,

manfaat, penamaan (peniruan, penyebutan, penemu/pembuat), hubungan/relasi, komponen, perubahan, kategori, dsb (2002). Adapun Fatimah (1999) menelaah makna dari aspek, jenis, tipe, perkembangan, hubungan, dsb., sedangkan Aminuddin (2001) mengulas semantik dalam hal hubungannya dengan disiplin ilmu lain (filsafat, psikologi, antropologi, kesastraan, logika, dan linguistik), teori dan pengembangannya, makna dan sistem tanda, dsb. Ketiga, sintaksis dipahami sebagai ilmu tata kalimat atau salah satu cabang tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frase. Tarigan dalam karyanya mengulas sintaksis dalam hal kalimat, klausa, dan frase beserta klasifikasinya (Tarigan, 1986). Kalimat dipahami sebagai satuan bahasa yang berdiri sendiri mempunyai pola intonasi, biasanya terdiri subyek, predikat, obyek, kadang kala diperkuat dengan keterangan (tempat atau waktu). Contoh: *Saya membaca buku bahasa Indonesia setiap minggu dua kali*. Sedangkan klausa adalah satuan bahasa berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri subyek, predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Contoh: *Saya membaca buku*. Adapun frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonprediktif. Misalnya: *gunung tinggi*. Keempat, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mengkaji seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahannya terhadap kelas dan arti kata. Ida Bagus menelaah dalam karyanya berupa afiksasi (imbuhan di awal kata), infiks (imbuhan di tengah kata), sufiks (imbuhan di akhir kata), dan imbuhan di awal dan di akhir kata (konfiks) (Putrayasa, 2008). Kelima, pragmatik adalah bidang linguistik yang mengkaji hubungan timbal balik antara fungsi dan bentuk tuturan. Rustono mengkaji pragmatik dalam hal sejarah perkembangan, konteks dan situasi tutur, tindak tutur, prinsip dan implikatur percakapan (Rustono, 1999), sedangkan Dewa Putu menambahkan kajian parameter pragmatik (1996). Keenam, wacana dapat disebut sebagai rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, komunikasi sebagai alat interaksi sosial menggunakan medium verbal (lisan dan tulis) maupun medium nonverbal (isyarat). Perwujudan medium verbal adalah wacana bersifat transaksional (monolog) atau interaksional (dialog). Tujuan penuangan wacana adalah menyampaikan informasi, menggugah perasaan, dan gabungan keduanya yang berfungsi informatif, emotif, dan informatif-emotif (Yayat, 2009).

Dinamika kajian bahasa tersebut karena eksistensi bahasa memiliki hakikat bahwa bahasa (1) sistemik (memiliki sistem berupa bunyi dan makna), (2) manasuka/arbitrer (*selected at random and without reason*) dipilih secara acak tanpa alasan. Misalnya: mengapa hewan berkaki empat

dan bertanduk disebut kerbau? Karena penyebutan tidak ada 'pantangan' dan bersifat alamiah maka aspek kemanusiaan mendominasi, (3) ucapan/vokal; berupa bunyi, (4) simbol; berupa tanda, (5) mengacu pada dirinya; dapat dikajinya sebuah bahasa dengan analisis bahasa (dalam konteks penelitian), (6) manusiawi; kekayaan yang hanya dimiliki manusia, dan (7) komunikasi; alat interaksi (Alwasilah, 1990:76). Modal utama pengguna bahasa adalah memahami kaidah dan memahami etika komunikasi/interaksi terutama dalam hal santun berbahasa atau berdialek, bahkan beridiolet (keseluruhan ciri perseorangan dalam berbahasa) dsb. Dengan adanya dialek, muncul demografi bahasa yakni gambaran wilayah pemakaian bahasa atau variasi bahasa dalam suatu masyarakat bahasa tertentu. Biasanya penggolongan berdasarkan status sosial pemakai bahasa atau variasi bahasa, pendidikan, umur, dsb. (ENI, 2004: 292). Ukuran berbahasa yang benar menurut Rosyid adalah penggunaan bahasa Indonesia yang menaati kaidah tata bahasa (taat asas), sedangkan yang dimaksud bahasa yang baik dalam konteks ini adalah dalam bahasa Jawa dikenal *unggah-ungguh* yakni berbahasa sesuai dengan situasi pemakainya seperti situasi resmi, tidak resmi, dsb. Situasi resmi misalnya sambutan kenegaraan, sambutan sebagai pimpinan lembaga. Sedangkan situasi tidak resmi misalnya percakapan (Rosyid, 2003: 5). Indikator penggunaan bahasa yang baik atau tepat adalah penggunaan bahasa yang serasi menurut golongan penutur.

### C. Simpulan

Konsep teoretik yang dibangun dalam landasan teori diharapkan muncul kesadaran bagi pengguna bahasa. Konsep yang harus dibekalkan berupa (1) kepunahan bahasa, (2) dinamika kaidah berbahasa, dan (3) santun berbahasa. Kesantunan berbahasa dapat dipahami dengan paparan riil berupa (1) bentuk bahasa santun berupa bahasa verbal dan bahasa nonverbal, (2) pemakaian bahasa santun, yakni menggunakan tuturan tidak langsung dan pemakaian bahasa dengan kata kias dan ungkapan memakai gaya bahasa penghalus. Perlu pula memahami strategi berkomunikasi agar santun dengan memahami pilihan kata (diksi) dan gaya bahasa. Hal yang utama yakni membekali dasar kajian bahasa dasar yakni kaidah fonetik, semantik, sintaksis, morfologi, pragmatik, dan wacana.

Adapun pengenalan praktek berbahasa pada anak usia dini dikenalkan konsep bahasa yang digunakan berinteraksi secara lisan, antara lain idiolet, aksen, dan dialek dan standar berbahasa yang benar yakni penggunaan bahasa Indonesia yang menaati kaidah tata bahasa (taat asas), sedangkan



Moh. Rosyid

yang dimaksud bahasa yang baik dalam konteks ini adalah dalam bahasa Jawa dikenal *unggah-ungguh* yakni berbahasa sesuai dengan situasi pemakainya seperti situasi resmi, tidak resmi, dsb. Mamahami karakter berbahasa ini merupakan kata kunci yang harus diberikan pemahaman pada pengguna bahasa sejak usia dini agar menjadi penutur yang santun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 1990. *Linguistik suatu Pengantar*. Angkasa: Bandung.
- Aminuddin. 2001. *Semantik Pengantar Studi tentang Makna*. Sinar Baru Algensindo: Bandung.
- Chaer, Abdul. 1990. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Rineka Cipta: Bandung.
- 2006. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Rineka Cipta: Bandung.
- Djajasudarma, T.Fatimah. 1999. *Semantik 2 Pemahaman Ilmu Makna*. Refika: Bandung.
- Doyin, Mukh dan Wagiran. 2009. *Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan Karya Ilmiah*. Unnes Press: Semarang.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI). 2004. Jilid IX.
- Jumanto. *Antara Kesantunan dan Keakraban*. *Suara Merdeka*, 3 Desember 2014.
- *Humaniora Digital dan Kesantunan*. *Suara Merdeka*, 26 Januari 2015.
- Kinayati. 2006. *Filsafat Bahasa*. Pustaka: Yogyakarta.
- Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis sebuah Pengantar*. UGM Press: Yogyakarta.
- Marsono. 1999. *Fonetik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Nadra dan Reniwati. *Dialektologi Teori dan Metode*. Elmaterra Publishing: Yogyakarta. 2009.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2008. *Kajian Morfologi (Bentuk Derivasional dan Infleksional)*. Refika Aditama: Bandung.
- Pranowo. *Berbahasa secara Santun*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2009.
- Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. IKIP Semarang Press: Semarang.
- Rahardi, R. Kunjana. *Selamatkan Bahasa Jawa!*. *Kompas*, 21 Februari. 2009.
- Rosyid, Moh. 2003. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Unnes Press: Semarang.
- Sabarianto, Dirgo. 2001. *Kebakuan dan Ketidakbakuan Kalimat dalam Bahasa Indonesia*. Mitra Gama Widya: Yogyakarta.
- Sudaryat, Yayat. 2009. *Makna dalam Wacana Prinsip-prinsip Semantik dan Pragmatik*. Yrama Widya: Bandung.
- Tarigan, Henry Guntur. 1986. *Pengajaran Sintaksis*. Angkasa: Bandung.
- Wijana, I. Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Andi: Yogyakarta.